



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI ACEH**

*

*

**

**

*

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI ACEH
12-16 OKTOBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh adalah untuk melakukan:

1. Diskusi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Banda Aceh;
2. Ramah Tamah dan Diskusi bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota serta Seluruh Mitra Kerja Komisi IV DPR RI Terkait.
3. Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengelolaan Pelabuhan Samudera Lampulo dan Optimalisasi *Cold Storage* di Pelabuhan Samudera Lampulo, Kota Banda Aceh; serta
4. Diskusi mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dalam rangka Mencapai Ketahanan Pangan di Balai Pemuliaan Tanaman Pangan Aceh, di Kota Banda Aceh.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 12-16 Oktober 2022. Kunjungan Kerja dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

B. GAMBARAN UMUM

1. Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Banda Aceh

Secara geografis, kawasan TN Gunung Leuser terletak pada koordinat 96°35" BT-98°30" BT dan 2°50" LU-4°10" LU. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian TN Gunung Leuser Provinsi Aceh serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian TN Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan TN Gunung Leuser adalah 830.268,95 ha (wilayah Provinsi Aceh: 624.913,83 ha dan wilayah Provinsi Sumatera Utara: 205.355,12 ha).

Secara administrasi kawasan TN Gunung Leuser berada di 2 (dua) provinsi, yaitu: Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang) dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo).

Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional (TN) Gunung Leuser yang semula berkokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, yang merupakan tindak lanjut pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.

Gedung operasional Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser di Banda Aceh, sebelumnya dikenal sebagai "Pusat Informasi Mangrove, Nanggroe Aceh Darussalam" yang diresmikan pada tanggal 15 April 2008 oleh Menteri Kehutanan RI dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Sejak peresmiannya, Gedung ini dikelola oleh Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II sampai dengan tahun 2016. Setelah itu, Gedung tersebut dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng Aceh.

Pemindahan kantor ini menjadi bagian dari upaya dalam mendorong Balai Besar TN Gunung Leuser sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu–isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.

Selain itu pemindahan Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Aceh. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat sekitar kawasan TN Gunung Leuser memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses kali ini, Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021, yang merupakan bagian rangkaian agenda Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

2. Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengelolaan Pelabuhan Samudra Lampulo dan Optimalisasi *Cold Storage* di Pelabuhan Samudera Lampulo, Kota Banda Aceh

Pelabuhan Perikanan merupakan kesatuan dari seluruh aktivitas usaha perikanan dengan menyediakan pelayanan terhadap pelaku perikanan yang menyerap tenaga kerja sangat besar untuk sektor industri perikanan dan ekonomi perikanan. Hal ini merujuk pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri KP No.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya mulai dari

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja-Lampulo merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Aceh, berlokasi di Kota Banda Aceh, pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera.

Keberadaan industri pengolahan ikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan jaminan pasar bagi para nelayan. Saat ini keuntungan dari nilai tambah tersebut dinikmati oleh pelaku ekonomi dari daerah lain seperti Medan. Kondisi ini juga memberikan kesan kurang baik kepada investor luar yang menganggap Aceh tidak memiliki potensi hasil perikanan.

Di sisi lain keberadaan *cold storage* bermanfaat untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas karena *cold storage* dapat berfungsi sebagai gudang penyimpanan untuk menjaga agar ikan dapat disimpan lebih lama dan dapat memenuhi standar volume ekspor. Namun sarana dan prasarana *cold storage* tidak optimal di Provinsi Aceh yang mana hal ini menyebabkan ikan-ikan unggulan ekspor tidak bisa diekspor langsung, tapi harus melalui eksportir yang berdomisili di luar Aceh.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo, sejak tahun 2014, mempunyai catatan produksi ikan yang didaratkan rata-rata mencapai 50 sampai dengan 100 ton per hari, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2, sehingga diperlukan dukungan berbagai sektor terutama ahli/transfer teknologi penangkapan ikan yang semakin maju.

Armada kapal penangkapan ikan yang mendaratkan ikannya di PPS Kutaraja menunjukkan peningkatan. Ini memperlihatkan PPS Kutaraja mempunyai peranan sebagai pelabuhan perikanan samudera yang terbesar di Provinsi Aceh.

Dari gambaran umum tentang PPS Kutaraja yang mengalami kemajuan namun masih terdapat kendala yang dihadapi secara teknis fasilitas, maka dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses kali ini, Komisi IV

DPR RI ingin melihat dan mendapatkan informasi secara langsung mengenai tindak lanjut program pembangunan ICS (*Integrated Cold Storage*) 200 Ton tahun 2016-2017 di PPS Kutaraja-Lampulo.

Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan gambaran mengenai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021, diantaranya sebagai berikut:

- a. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSKP) KKP untuk segera mengoperasionalkan ICS 200 ton di PPS Kutaraja-lampulo Provinsi Aceh, sehingga program atau sistem rantai dingin berjalan dan kebermanfaatannya dirasakan oleh pelaku usaha seluruh Aceh dan sekitarnya.
- b. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSKP) KKP melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sewa aset ICS 200 ton di PPS Kutaraja-Lampulo, hal ini menjadi sangat penting karena pembangunan ICS 200 ton tersebut dilakukan sejak tahun 2016-2017 yang seharusnya sudah berjalan, sehingga diharapkan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Diskusi mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dalam rangka Mencapai Ketahanan Pangan di Balai Pemuliaan Tanaman Pangan Aceh, di Kota Banda Aceh

Pemenuhan pangan merupakan hak asasi rakyat dan negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Lahan merupakan faktor produksi pertanian yang utama untuk peningkatan produksi Pangan. Faktanya adalah, jumlah lahan terbatas dan lahan juga merupakan sumberdaya alam yang hampir tidak terbarui (*non renewable*), sedangkan manusia yang memerlukan lahan jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2022 jumlah penduduk dunia diprediksi akan mencapai 8

miliar orang, sementara prediksi pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,7 milyar orang.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, bukan saja kebutuhan pangan yang meningkat, tetapi juga kebutuhan sandang dan papan. Peningkatan kebutuhan sandang dan papan ini berkorelasi positif dengan pengurangan areal lahan pertanian, yang kita kenal dengan alih fungsi lahan pertanian. Dalam konteks peningkatan kebutuhan pangan tersebut, seyogyanya diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, melalui perbaikan produktivitas dan produksi yang dapat dicapai, baik melalui intensifikasi pertanian maupun melalui perluasan areal. Mengacu pada data Kementerian ATR/BPN, luas lahan pada tahun 2019 tercatat 7,46 juta ha, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan luas lahan pada tahun 2013, yaitu seluas 7,75 juta hektar. Hal ini berarti terjadi alih fungsi atau konversi lahan pertanian rata-rata sebesar 100.000 ha/tahun. Alih fungsi lahan pertanian, tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem yang berdampak kepada meningkatnya pemanasan global (*global warming*), degradasi tradisi dan budaya pertanian. Alih fungsi lahan juga merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
- c. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
- d. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,

- e. Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- f. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Tidak hanya itu, upaya pencegahan alih fungsi lahan juga diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Lebih lanjut lagi, kecukupan ketersediaan pangan salah satunya dipenuhi melalui peningkatan produksi maupun produktivitas. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budi daya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Sarana produksi yang mempunyai peranan sangat penting salah satunya adalah ketersediaan pupuk yang berkualitas, mencukupi dan berimbang. Karena pentingnya ketersediaan pupuk dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan, permasalahan pupuk merupakan topik yang selalu dibahas dan dikritisi oleh Komisi IV DPR RI.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Diskusi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Banda Aceh

a. Data teknis areal Taman Nasional Gunung Leuser diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Secara geografis, kawasan TN Gunung Leuser terletak pada koordinat 96°35" BT - 98°30" BT dan 2°50" LU - 4°10" LU. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan sebagian Taman Nasional Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4039/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagian Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan TN

Gunung Leuser adalah 830.268,95 hektar (wilayah Provinsi Aceh adalah seluas 624.913,83 hektar dan wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 205.355,12 hektar).

- 2) Secara administrasi kawasan TN Gunung Leuser berada di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang serta Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.
 - 3) TN Gunung Leuser merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki sekaligus 4 (empat) species satwa dilindungi, yaitu gajah, harimau, orang utan, dan badak serta merupakan kawasan hutan dengan tutupan lahan di atas 70% dan merupakan kawasan hutan yang stabil.
- b. Hasil diskusi dan pertemuan di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser:
- 1) Pemindehan kantor Balai Besar TN Gunung Leuser merupakan bagian dari upaya dalam mendorong Balai Besar TNGL sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis pelindungan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.
 - 2) Pemindehan Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Aceh, dengan tujuan akhir agar masyarakat sekitar kawasan TN Gunung Leuser memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.
 - 3) Namun sejak dilaksanakannya pemindehan kantor Balai Besar TN Gunung Leuser dari Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara) ke

pada tanggal 16 Februari 2021, belum terlihat adanya progres pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Balai Besar TN di Kota Banda Aceh (Provinsi Aceh) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

- 4) TN Gunung Leuser merupakan salah satu taman nasional terbaik di dunia, namun tidak mendapatkan dukungan anggaran yang baik dari Pemerintah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan.
- 5) Sampai dengan saat ini telah banyak dukungan pendanaan dari pihak *Non Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dari dalam dan luar negeri, namun semuanya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya evaluasi atas capaian target yang telah ditentukan dalam melaksanakan konservasi keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya di TN Gunung Leuser.
- 6) Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan membahas mengenai *road map* pengelolaan TN Gunung Leuser dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya, khususnya di wilayah TN Gunung Leuser.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Balai Besar TN di Kota Banda Aceh (Provinsi Aceh) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konservasi yang dilakukan oleh, pasca dilaksanakannya pemindahan kantor Balai Besar TN Gunung Leuser dari Kota Merdan (Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 16 Februari 2021.

2. Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan dukungan anggaran pada Balai Besar TN Gunung Leuser, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, di tingkat tapak.
3. Komisi IV DPR RI mendorong dilaksanakannya pengaturan pengelolaan dana dalam rangka melaksanakan konservasi keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya di TN Gunung Leuser, yang bersumber dari pihak *Non Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan membahas mengenai *road map* pengelolaan TN Gunung Leuser dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya, khususnya di wilayah TN Gunung Leuser.

2. Ramah Tamah dan Diskusi bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota serta Seluruh Mitra Kerja Komisi IV DPR RI Terkait

a. Gubernur Aceh

- 1) Pemerintah Aceh berterima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI untuk mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan.
- 2) Saat ini Pemerintah Aceh sedang merencanakan pembangunan pabrik garam di Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue, yang memiliki potensi sumber bahan baku untuk pengembangan usaha garam dimaksud, dalam rangka memenuhi pasokan kebutuhan garam di Pulau Simeulue dan Provinsi Aceh.
- 3) Saat ini Pemerintah Aceh sedang merencanakan program Pembangunan Rumah Nilam untuk memaksimalkan

pengembangan potensi nilam di Provinsi Aceh, dalam rangka memenuhi pasokan kebutuhan ekspor nilam, sebagai alternatif produk prioritas kopi yang saat ini sudah berhasil dikembangkan di Provinsi Aceh.

- 4) Pemerintah Aceh mengharapkan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh.

b. Komisi IV DPR RI

- 1) Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 juga merupakan tindak lanjut atas Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, diantaranya untuk melihat dan mendapatkan informasi secara langsung mengenai:
 - Optimalisasi penyelenggaraan konservasi di TN Gunung Leuser pasca pemindahan Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser ke Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2021.
 - Program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan.
- 2) Provinsi Aceh patut bangga karena memiliki TN Gunung Leuser yang merupakan salah satu taman nasional terbaik di dunia dan merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki sekaligus 4 (empat) species satwa dilindungi, yaitu gajah, harimau, orang utan, dan badak, serta merupakan kawasan hutan dengan tutupan lahan di atas 70% dan merupakan kawasan hutan yang stabil.
- 3) Saat ini Komisi IV DPR RI sedang telah selesai melaksanakan penyusunan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Beberapa hal yang menjadi urgensi atas penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Daerah yang memiliki kawasan konservasi yang luas akan mendapatkan porsi pembagian penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besar sesuai dengan prinsip keadilan dan kelestarian, dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pengewetan serta pemulihan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - Memberikan peran yang maksimal kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan, terutama partisipasi Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk ikut serta melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 4) Komisi IV DPR RI bersedia memfasilitasi/menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV DP RI.
 - 5) Diperlukan adanya dukungan serta koordinasi dan komunikasi yang baik antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait permasalahan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dalam rangka penyerapan dan pelaksanaan program di masing-masing kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani/masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
 - 6) Komisi IV DPR RI menyayangkan ketidakhadiran Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Pertanian dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 kali ini.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendukung program yang direncanakan oleh Pemerintah Aceh, yaitu sebagai berikut:
 - a) Program Pembangunan Pabrik Garam di Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue; serta
 - b) Program Pembangunan Rumah Nilam.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Aceh dapat melakukan kajian lebih mendalam berupa kajian strategis serta kajian

mengenai dampak lingkungan dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan.

2. Komisi IV DPR RI menyanggkan ketidakhadiran Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Pertanian dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 kali ini. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga serta Direktur Utama Perusahaan BUMN Mitra Kerja Komisi IV DPR RI agar dapat menugaskan pejabat Eselon I dan Eselon II serta Direksi sebagai Pejabat Pendamping Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, sehingga dimungkinkan untuk diambilnya keputusan/kesepakatan mengikat yang harus ditindaklanjuti dalam setiap Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

3. Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengelolaan Pelabuhan Samudra Lampulo dan Optimalisasi *Cold Storage* di Pelabuhan Samudera Lampulo, Kota Banda Aceh

a. Kunjungan ke *Integrated Cold Storage* Lampulo

- 1) Kondisi Teknis dan Pengelolaan *Integrated Cold Storage* Lampulo
 - a) *Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo yang terletak di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Lampulo di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh merupakan aset milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibangun dengan dana sebesar sekitar Rp9 miliar (sembilan miliar rupiah). Pada tahun 2016, ICS Lampulo diserahkan sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2016, dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh.
 - b) ICS Lampulo memiliki kapasitas *Air Blast Freezer* (ABF)/tempat pembekuan ikan sebesar 10 (sepuluh) ton dan *cold storage*/tempat pendingin ikan sebesar 200 (dua ratus) ton.
 - c) Pada tahun 2017 DKP Aceh melaksanakan tender pengelolaan ICS Lampulo yang dimenangkan oleh investor dengan kontrak setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp834 miliar (delapan ratus tiga puluh empat miliar) per tahun. Namun

kerja sama pengelolaan ICS Lampulo tidak berjalan sesuai target, dan aset ICS Lampulo mangkrak selama hampr 4 (empat) tahun.

- d) Pada bulan April 2021 pihak DKP Aceh melakukan kerja sama dengan CV Doa Sibuah Hati (CV DSH), melalui kontrak kerja sama perbaikan dan pengadaan peralatan yang rusak, senilai sekitar Rp120 juta (seratus dua puluh juta rupiah).
- e) Saat ini pengelolaan ICS Lampulo belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga realisasi PAD sektor Kelautan dan Perikanan pun belum dapat direalisasikan secara maksimal.
- f) Beberapa perbaikan yang dinilai perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Perbaikan sistem manajemen pengelolaan ICS Lampulo
 - Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia ICS Lampulo
 - Perbaikan sarana prasarana peralatan ICS Lampulo

2) Data Realisasi Produksi ICS Lampulo dan PAD Aceh Tahun 2022

No	Bulan	Produksi (Kg)	PAD (Rp)
1	Januari	8.006	12.090.000
2	Februari	50.606	75.912.000
3	Maret	43.800	65.700.000
4	April	50.133	75.199.500
5	Mei	-	-
6	Juni	21;333	31.909.500
7	Juli	17.418	26.127.000
8	Agustus	33.700	50.550.000
9	September	40.822	61.233.000
Jumlah		91.940	169.819.500

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk dapat melakukan koordinasi

dalama rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan ICS Lampulo, melalui perbaikan sistem pengelolaan, peningkatan kualitas dan kualitas sumber daya, serta perbaikan sarana, prasaranana, dan peralatan ICS Lampulo.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk dapat meningkatkan PAD Aceh pada sektor Kelautan dan Perikanan, melalui peningkatan produksi ICS Lampulo.

b. Diskusi di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo

Aspirasi yang disamlaikan:

- 1) Nelayan mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM, yang menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Untuk itu para nelayan mengharapkan agar Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM.
- 2) Nelayan meminta agar Pemerintah agar dapat meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkap nelayan.
- 3) Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Aceh masih banyak yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sehingga saat ini terjadi antrian panjang pada EPBN di seluruh Pelabuhan Perikanan di Provinsi Aceh. Untuk itu nelayan meminta agar Pemerintah dapat membangun SPBN pada pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya kapal pengangkut ikan nelayan kecil, dengan didukung dengan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
- 4) Nelayan mengharapkan program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan dapat segera dilaksanakan, mengingat banyaknya kapal pengangkut ikan milik nelayan yang mengalami kesulitan bersandar.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan program pengerukan

sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan, yang sudah menjadi dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2023.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka melaksanakan program peningkatan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas nelayan dalam pengembangan produk hasil kelautan dan perikanan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah dalam mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Nakar Nelayan (SPBN) pada pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya kapal pengangkut ikan nelayan kecil, dengan didukung dengan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.

4. Diskusi mengenai Upaya Peningkatan Produksi Pertanian dalam rangka Mencapai Ketahanan Pangan di Balai Pemuliaan Tanaman Pangan Aceh, di Kota Banda Aceh

a. Inflasi di Provinsi Aceh



PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Sept 2022
7,85% (2021: 2,07%)
Agt 8,87% (11)
Juli 7,5% (11)

Sept 2021
6,10% (2021: 1,48%)
Agt 4,99%
Juli 5,8%

Sept 2021
7,38% (2021: 2,12%)
Agt 6,33% (8)
Juli 6,97% (3)

Sept 2021
8,02% (2021: 1,48%)
Agt 8,86% (18)
Juli 7,18% (15)

Permasalahan

- Inflasi Masih Tinggi: Sept 2022: 7,38, Agustus 22 menjadi 6,33%/Peringkat 8. Juli 2022: 6,97% (Peringkat 5) dan

Penyebab Inflasi

- Enam komoditas utama : Bensin 0,86%, Beras 0,11%, Angkutan Antar Kota, 0,09%, Solar, 00,3%, Ikan Kembang 0,03%, Service 0,02%.

Sudah Dilakukan

- Rilis Berita Resmi Statistik, Rakor/RatekTIPD (Komunikasi Publik), Launching GNPIP Aceh, Ratek Pengendalian Inflasi seluruh Kab/kota, Cascading Penganggaran Tanggap Inflasi, WAG, Revisi SK TPID, Melaporkan Fluktuasi Harga 9 Bahan Pokok
- Gelar Pasar Murah (23 Kab/Kota, 2 kali), Bazar Pangan Murah (3 kali), Pasar Tani (8 kali).
- Tanam Cabe (276 Ha), Tanam Bawang Merah (93 Ha), Padi (16.571 Ha), Bantuan Unit Pengolahan Cabe (1 unit) dan Bantuan UPH Bawang merah (1 unit), Penangkaran benih bawang merah (15 Ha), Pemb. Coldstorage bawang merah (1 unit), MoU Distribusi cabe merah, Peкарangan Pangan Lestari (128 Kelompok), pengadaan sapi (593 ekor), pengadaan ayam petelur (50 rb ekor)

Akan Dilakukan (Okt-Des 2022)

- Gelar Pangan Murah (6 Kab/Kota), Pasar tani (4 Kab/Kota), Pasar Murah (23 kab/Kota, 2 Kali), subsidi beras (5 Kab/Kota), Operasi Pasar daerah miskin, tanam cabe (118 Ha), bawang merah (63 Ha), UPH cabe (2 unit), UPH bawang merah (3 unit), produksi telur 40 rb butir/hari (punya pemerintah)
- Bantuan distribusi pangan (ongkos angkut)
- Bantuan Ikan Segar di 4 Kabupaten
- Pengaturan pola tanam kontinyu
- Percepatan tender pra DPA bin Okt, Nov dan Des

Target Yang akan Dicapai 2022

- Oktober : 7,39 %, November : 7,22 %, Desember : 7,05 %, Nas 6,79% (proyeksi)

Apa Yang Dilakukan Kabupaten / Kota.

- Komunikasi Publik, Aktifkan TPID/Satgas Pangan Perkuat koordinasi & Pengawasan
- BBM Subsidi untuk tidak mampu, Gerakan Hemat Energi Memperkecil biaya untuk BBM & Listrik
- Gerakan Tanam Cepat Panen dan Pola Tanam Jaga Kestabilan Harga
- Kerjasama Antar Daerah Menjaga rantai pasokan
- Jaringan Pengaman Sosial (BTT, Bansos Daerah, Anggaran Desa, DAU, Bansos Pusat)
- Umumkan Inflasi & Jadikan isu Prioritas dan Utama

b. Permasalahan Irigasi di Provinsi Aceh

PERMASALAHAN IRIGASI DI ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTANIAN BEBERAPA DAERAH IRIGASI YANG BELUM OPTIMAL DI PROVINSI ACEH :

- DI. KRUENG PASE**
- DI. JAMBO AYE**
- DI. RAJUI**

1

- Bendung Krueng Pasee Jebol/mengalami Kerusakan akibat Banjir Besar
- Daerahnya ±5000 ha sawah di 8 kec di m Kab. Aceh Utara dan 1 kec Di Kota Lhokseumawe *) tidak dapat melakukan penanaman hanya mengandalkan sumber air hujan
- Sawah dilokasi sangat produktif apabila distribusi air irigasi kembali normal

Permohonan Tindak Lanjut :

- Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Bendung Krueng Pase.
- Rencana Penggunaan sumber air lainnya, pompanisasi dan sumur bor.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier untuk memperluas daerah layanan irigasi
- Perluanya optimasi lahan dilokasi setelah air dapat terdistribusi kembali.

2

- Jaringan Irigasi Jambo Ayee Sayap kanan belum berfungsi
- Dampaknya ±3000 ha sawah di kec. Pante Bidari, Simpang Ulim, Madat, Nurussalam dan Julok Ka b. Aceh Timur mengalami kekurangan air.
- Sawah dilokasi sangat produktif apabila distribusi air irigasi kembali normal

Permohonan Tindak Lanjut :

- Percepatan Proses Pembebasan Lahan.
- Percepatan Penyelesaian pelaksanaan jaringan irigasi Sayap kanan
- Rencana Penggunaan sumber air lainnya, pompanisasi dan sumur bor.
- Perluanya Lining Saluran Tersier (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) untuk memperluas daerah layanan irigasi

3

- Di Rajui hanya mampu mengairi 400 ha dari 1000 ha yang direncanakan
- Setengah luas sawah (±600ha) di padang tiji belum dapat terairi dan hanya mengandalkan sumber air hujan
- Kekurangan air akibat debit andalan yang berkurang.

Permohonan Tindak Lanjut :

- Reboisasi Hulu Kr. Rajui agar Debit dapat tercukupi.
- Rencana Penggunaan sumber air lainnya, Sumur Bor dan Embung Pertanian.
- Perluanya Lining Saluran Tersier (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) untuk memperluas daerah layanan irigasi

*) Kab. Aceh Utara : Kec. Meurah Mulia, Tanah Luas, Nibong, Syamtalira Aron, Bayu, Samudera, Tanah Pasir dan Matang Kuli. Kota Lhokseumawe : Kec. Blang Mangat

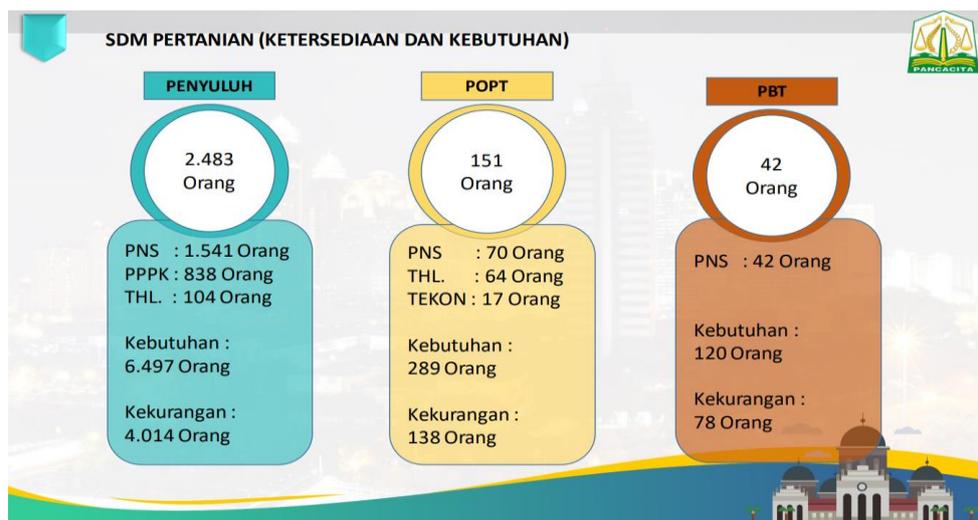
c. Dampak Banjir bagi Sektor Pertanian di Provinsi Aceh

PADI, JAGUNG dan KEDELAI							
Komoditi : Padi							
No.	Kabupaten/ Kota	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
JUMLAH BANJIR DIPERTANAMAN		10.857	1-110	5.697	515	1.420	3.527
1	Aceh Utara	9.140	1-110	4.687	473	729	3.250
2	Lhokseumawe	81	5-60	19	5	14	-
3	Aceh Besar	147	5-35	147	13	134	-
4	Bireuen	207	15-90	51	7	44	-
5	Aceh Timur	1.277	1-110	792	17	498	277
6	Aceh Tamiang	5	7-45	1	-	1	-
BANJIR DI PERSEMAIAN							
No.	Kabupaten	Untuk Luas Tanam (ha)	Umur Semai (hss)	Banjir			
				Terkena Uk Luas Tanam (ha)	Puso Uk Luas Tanam (ha)	Surut Uk Luas Tanam (ha)	Tergenang Uk Luas Tanam (ha)
JUMLAH BANJIR DIPERSEMAIAN		1.452	semai	995	481	53	461
1	Aceh Utara	1.424	semai	971	481	29	461
2	Aceh Timur	28	semai	24	-	24	-
Komoditi : Jagung							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Timur	57	60-75	57	5	25	27
Komoditi : Kedelai							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	30,5	20-55	10,5	0,5	-	10

Cabe, dan Tanaman Hortikultura lainnya

Komoditi : Cabe							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	17	20-panen	12,5	0,5	-	12
Komoditi : Mentimun							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	2,0	70	1,7	0,2	-	1,5
Komoditi : Kacang Panjang							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	4	30	3,5	0,5	-	3
Komoditi : Sawi							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	0,2	20	0,2	-	-	0,2
Komoditi : Bayam							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	0,2	30	0,2	-	-	0,2
Komoditi : Kangkung							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	0,2	20	0,2	-	-	0,2
Komoditi : Terong							
No.	Kabupaten	Luas Tanam (ha)	Umur Tanaman (hst)	Banjir			
				Terkena (ha)	Puso (ha)	Surut (ha)	Tergenang (ha)
1	Aceh Utara	1	20-40	0,5	0,5	-	-

d. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM Pertanian di Provinsi Aceh



e. Pengembangan Kawasan *Food Estate* dan Bantuan Sapropdi Tanaman Pangan di Provinsi Aceh

PENGEMBANGAN KAWASAN FOOD ESTATE, BANTUAN SAPRODI TANAMAN PANGAN

No	Usulan Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Surat No : 520/89501.3 tgl 14 April 2022	Kesiapan Proyek (Lahan/FS/DED dan Lainnya)
1.	Pengembangan Kawasan Food Estate Kabupaten Aceh Besar 10.000 Ha • Bantuan Benih Padi dan pupuk NPK Rp.26,7 M	✓ Kab Aceh Besar
2.	Pemulihan ekonomi Masyarakat akibat kerusakan jaringan irigasi Krueng Pase Kabupaten Aceh Utara 10.039 Ha • Bantuan Benih, Pupuk dan Herbisida Rp. 23,7 M	✓ Kab Aceh Utara
3.	Bantuan benih padi untuk lahan terdampak banjir 5.106 Ha Rp. 1,3 M	✓ 6 Kabupaten
4.	Revitalisasi Kilang Padi (Alat kilang padi modern Rp.17 M	✓ 3 Kabupaten
5.	Bantuan Alat dan mesin pertanian • Combine Harvester Rp.2,5 M	✓ Brigade

Urgensi/Permasalahan :

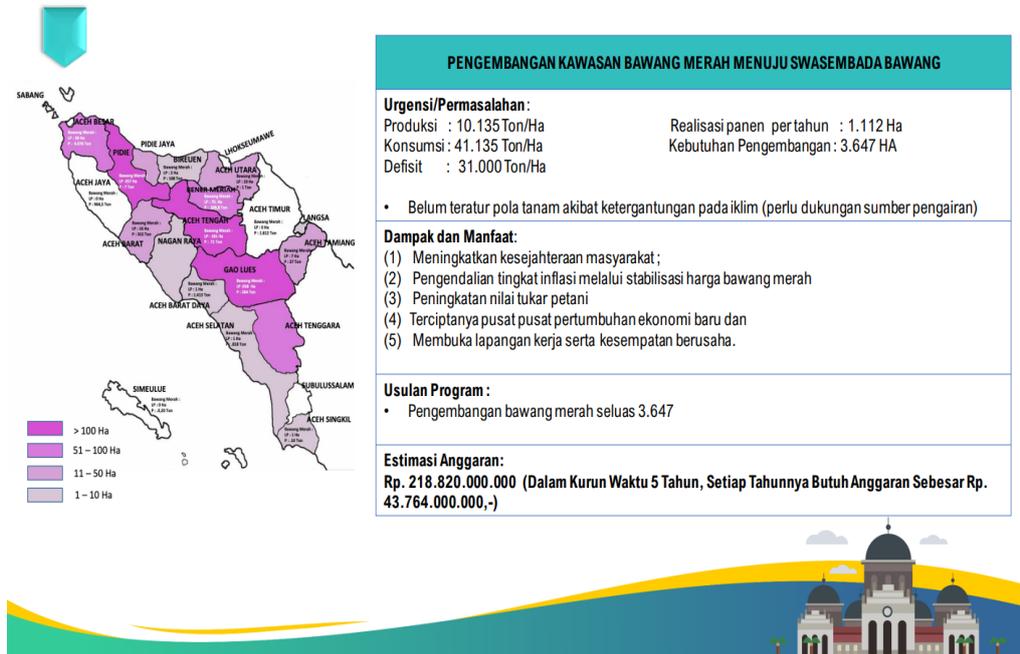
- Belum Keluar Keppres/Kepmentan Penetapan Kawasan Food Estate Aceh
- Memulihkan ekonomi masyarakat melalui upaya pemanfaatan lahan terdampak akibat kerusakan irigasi selama 2 tahun terakhir
- Upaya penganggulangan bencana alam banjir melalui pemberian bantuan benih padi
- Upaya peningkatan mutu, penurunan kehilangan hasil dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan alat pengolahan dan bantuan alsin pasca panen

Total Kebutuhan Pendanaan Rp. 71.200.000.000,-

Dukungan DPR RI

- Dukungan dan dorongan dari DPR RI agar Pemerintah Pusat untuk penentuan Keppres/Kepmentan tentang
- Dukungan dari DPR RI agar Pemerintah Pusat mengalokasikan Bantuan Sapropdi Pertanian dan Alat Mesin Pasca panen di Aceh

f. Pengembangan Kawasan Bawang Merah Menuju Swasembada Bawang di Provinsi Aceh



g. Kebutuhan Pengembangan Perkebunan Komoditas Unggul

4 KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KOMODITI UNGGUL			
No	Usulan Gubernur Surat No : 520/12553 tgl 15 Agustus 2022	Realisasi Usulan	Kesiapan Proyek (Lahar/FS/DED dan Lainnya)
1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peremajaan Tanaman Kakao 2.000 Ha ✓ Peremajaan Tanaman Kopi 2.800 Ha ✓ Pengembangan Tanaman Nilam 750 Ha ✓ Replanting Tanaman Kelapa Sawit 7.377 Ha ✓ Integrasi Tanaman Sawit dengan Jagung 6.000 Ha 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 100 Ha ✓ 200 Ha ✓ 0 Ha ✓ 0 Ha ✓ 0 HA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Di 4 Kab/Kota ✓ Di 4 Kab/Kota ✓ Di 5 Kab/Kota ✓ Di 11 Kab/Kota ✓ Di 4 Kab/Kota
Urgensi/Permasalahan: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Umur Tanaman Kakao, kopi > 25 Tahun ❑ Usulan PSR ke Dirjenbun Kementan RI seluas 7.377 Ha belum terealisasi ❑ Pengembangan Tanaman Nilam usulan Kabupaten seluas 750 Ha yang tersebar di : Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Baatr, Aceh Jaya dan Aceh Besar namun yang terakomodir masih Nihil. (Kebutuhan Pendanaan Rp.205.900.019.000) ❑ Integrasi Tanaman Sawit dengan Jagung usulan Kabupaten seluas 6.000 Ha Namun yang terakomodir Masih Nihil. (Kebutuhan Pendanaan Rp. 18.000.000.000) 			
DAMPAK: <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Kopi dan Kakao Rendah • Petani pengusul PSR sudah mulai resah terkait realiasi usulan • Pengembangan Nilam dan integrasi tanaman sawit belum dapat direncanakan pengembangannya 			
Total Kebutuhan Dana Rp. 612.151.279.000,-			

h. Pengembangan Jalan Pertanian, Alat Mesin Pertanian, KUR, PSR, Kartu Tani dan Pengembangan Irigasi Pertanian

PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN, ALAT MESIN PERTANIAN, KUR PSR, KARTU TANI DAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERTANIAN							
No	Mayor Project (MP)/Proyek Prioritas Nasional/Usulan Strategis Kawasan	No	Usulan Gubernur Surat No : 520/12553 tgl 15 Agustus 2022	Indikasi Sumber Pendanaan	Dukungan Daerah	Kesiapan Proyek (Lahan/FS/DED dan Lainnya)	Indikasi Kebutuhan Anggaran
1.	Non Mayor Project	1.	✓ Jalan Pertanian sebanyak 59 unit	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Di 11 Kab/Kota	✓ Rp. 5.900.000.000,-
		2.	✓ Alsintan(Traktor 4WD 7 Unit, Cultivator 24 Unit, Traktor Roda 2 sebanyak 44 unit)	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Di 12 Kabupaten	✓ Rp. 4.600.000.000,-
		3.	✓ Percepatan Implementasi Penyaluran KUR Khusus di Aceh untuk PSR	✓ APBN	✓ Lahan & PSR	✓ Rencana 2023	✓ Rp. 2.400.000.000.000,-
		4.	✓ Percepatan Implementasi Kartu Tani di Aceh	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Di 22 Kab/Kota	✓ Rp. 2.301.795.000,-
		5.	✓ Pembangunan Embung Pertanian	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Kebutuhan 20 unit	✓ Rp. 2.400.000.000,-
		6.	✓ Pengembangan Irigasi Sprinkel	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Kebutuhan 5 unit di Kab. Bener Meriah	✓ Rp. 390.000.000,-
		7.	✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Kebutuhan 100 unit	✓ Rp. 7.500.000.000,-
		8.	✓ Pengembangan Irigasi Perpompaan	✓ APBN	✓ Lahan	✓ Kebutuhan 25 Unit	✓ Rp. 2.690.000.000,-

Urgensi/Permasalahan :

- Pemendagri 90 Tahun 2019 membatasi kewenangan Provinsi dalam penyediaan Alsintan dan pembangunan infrastruktur pertanian (Jalan Usaha Tani, Pembangunan Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier).
- Saat ini kondisi Alat dan Mesin Pertanian di Aceh sangat memprihatinkan dimana keberadaan UPTD Mekanisasi Pertanian yang selama ini memberi dukungan kepada petani dalam mengakses alat dan mesin, Disisi lain alat dan mesin yang tersedia di UPTD Mekanisasi Pertanian saat ini tidak mampu memenuhi secara maksimal kebutuhan alat dan mesin bagi petani yang terus meningkat, dan dikhawatirkan alat dan mesin tersebut memiliki pengurangan nilai pakainya (aus) suatu saat akan berhenti jika tidak dibarengi dengan penambahan alat yang baru.
- KUR merupakan salah satu pendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), dalam hal ini petani akan kehilangan pendapatan karena baru menghasilkan pada umur 3-4 tahun. Untuk itu perlu dukungan KUR khusus untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Alat penebasan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerimanya
- Akibat debit air yang terus berkurang sehingga menyebabkan ketersediaan air di areal sawah, lahan hortikultura, dan perkebunan tidak mencukupi, maka dibutuhkan pembangunan embung pertanian sebagai teknik penyimpanan air yang dapat dipergunakan pada musim kemarau, pengembangan irigasi perpompaan sebagai teknik pemanenan air permukaan, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi tersier untuk mencegah kehilangan air irigasi pada saat distribusi sehingga menambah luas layanan irigasi.

Total Kebutuhan Anggaran :Rp. 2.446.697.395.000

Dukungan DPR RI :

- Dukungan dari DPR RI agar Pemerintah Pusat mengalokasikan Alat dan Mesin Pertanian, Jalan Pertanian, Embung, Irigasi Sprinkel, Irigasi Perpompaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Aceh
- Dukungan DPR RI ke Kementan untuk upgrade Sistem Digitalisasi kartu tani untuk penebasan pupuk bersubsidi dalam rangka pengembangan kartu tani digital di Aceh.

i. Aspirasi yang disampaikan:

- 1) Provinsi Aceh masih memerlukan banyak tenaga Penyuluh Pertanian.
- 2) Fasilitas perlengkapan kerja yang dimiliki oleh Penyuluh Pertanian di Provinsi Aceh (seperti Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), pH meter, rompi, serta sepatu boot panjang yang dapat dipergunakan untuk turun ke areal persawahan) masih sangat terbatas, sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tugas di lapangan.
- 3) Diperlukan dukungan Pemerintah untuk pengembangan jenis sapi lokal Aceh, yaitu Sapi Pedaging untuk wilayah Aceh Besar dan Sapi Perah untuk wilayah Aceh Tengah.
- 4) Diperlukan dukungan Pemerintah untuk peremajaan kembali tanaman kopi lokal (Kopi Gayo) yang sudah berumur tua dan sudah tidak lagi produktif.
- 5) Diperlukan dukungan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Pemerintah, seperti mesin pompa air, dan lainnya.
- 6) Diperlukan dukungan pembangunan bendungan utama di wilayah Aceh Timur, mengingat sudah tersedianya saluran irigasi sekunder sarana irigasi. Saat ini lahan sawah di wilayah Aceh Utara

terancam beralih fungsi untuk kegiatan non pertanian, terutama kegiatan perkebunan kelapa sawit.

j. Tanggapan Pemerintah:

- 1) Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan bendungan utama dan kerusakan irigasi sekunder. Diharapkan, untuk sementara petani dapat menanggulangi/mengatasinya dengan bantuan peralatan dan mesin pertanian (alsintan) lain, seperti pompa air dan lainnya.
- 2) Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan benih/bibit unggul pengganti kepada petani yang areal pertaniannya mengalami kerusakan akibat bencana banjir.
- 3) Kementerian Pertanian c.q. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbang) Pertanian/Badan Standarisasi Instrumen (BSI) Pertanian akan memberikan bantuan PUTS dan pH Meter bagi para Penyuluh Pertanian Provinsi Aceh. Untuk itu, agar Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh bersama dengan seluruh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat segera mengajukan permohonan bantuan peralatan kerja di maksud, sesuai dengan keperluan di lapangan.
- 4) Kementerian Pertanian c.q. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbang) Pertanian/Badan Standardisasi Instrumen (BSI) Pertanian akan melakukan koordinasi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih unggul bawang merah di Provinsi Aceh.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian agar berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan bendungan utama dan kerusakan irigasi sekunder di Provinsi Aceh.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan benih/bibit unggul pengganti kepada petani yang areal pertaniannya mengalami kerusakan akibat bencana banjir.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian c.q. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbang) Pertanian/Badan Standardisasi Instrumen (BSI) Pertanian dalam memberikan bantuan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan pH Meter bagi para Penyuluh Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh agar dapat segera mengajukan permohonan bantuan peralatan kerja dimaksud, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memenuhi kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian karena penyuluh merupakan ujung tombak keberhasilan pertanian di Indonesia serta keberhasilan program ketahanan pangan di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan operasional Kantor Balai Besar TN di Kota Banda Aceh (Provinsi Aceh) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan konservasi yang dilakukan oleh, pasca dilaksanakannya pemindahan kantor Balai Besar TN Gunung Leuser dari Kota Medan (Provinsi Sumatera Utara) pada tanggal 16 Februari 2021.
2. Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan dukungan anggaran pada Balai Besar TN Gunung Leuser, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan, di tingkat tapak.
3. Komisi IV DPR RI mendorong dilaksanakannya pengaturan pengelolaan dana dalam rangka melaksanakan konservasi keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya di TN Gunung Leuser, yang bersumber dari pihak *Non Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan

membahas mengenai *road map* pengelolaan TN Gunung Leuser dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumber daya alam dan ekosistemnya, khususnya di wilayah TN Gunung Leuser.

5. Komisi IV DPR RI mendukung program yang direncanakan oleh Pemerintah Aceh, yaitu sebagai berikut:

a) Program Pembangunan Pabrik Garam di Pulau Simeulue, Kabupaten Simeulue; serta

b) Program Pembangunan Rumah Nilam.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Aceh dapat melakukan kajian lebih mendalam berupa kajian strategis serta kajian mengenai dampak lingkungan dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan program pengerukan sebagian areal Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo yang mengalami pendangkalan, yang sudah menjadi dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2023.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk dapat melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan ICS Lampulo, melalui perbaikan sistem pengelolaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan sarana, prasarana, dan peralatan ICS Lampulo. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk dapat meningkatkan PAD Aceh pada sektor Kelautan dan Perikanan, melalui peningkatan produksi ICS Lampulo.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka melaksanakan program peningkatan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas nelayan dalam pengembangan produk hasil kelautan dan perikanan.

9. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Pemerintah dalam mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) pada pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya kapal pengangkut ikan nelayan kecil, dengan didukung dengan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.
10. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian agar berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan bendungan utama dan kerusakan irigasi sekunder di Provinsi Aceh.
11. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan benih/bibit unggul pengganti kepada petani yang areal pertaniannya mengalami kerusakan akibat bencana banjir.
12. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian c.q. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Balitbang) Pertanian/Badan Standardisasi Instrumen (BSI) Pertanian dalam memberikan bantuan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan pH Meter bagi para Penyuluh Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh agar dapat segera mengajukan permohonan bantuan peralatan kerja di maksud, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
13. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memenuhi kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian karena penyuluh merupakan ujung tombak keberhasilan pertanian di Indonesia serta keberhasilan program ketahanan pangan di Indonesia.
14. Komisi IV DP RI meminta seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga serta Direktur Utama Perusahaan BUMN Mitra Kerja Komisi IV DPR RI agar dapat menugaskan pejabat Eselon I dan Eselon II serta Direksi sebagai Pejabat Pendamping Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, sehingga dimungkinkan untuk diambilnya keputusan/kesepakatan mengikat yang harus ditindaklanjuti dalam setiap Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 17 Oktober 2022

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H
A-41

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Pertemuan di Kantor Balai Besar TN Gunung Leuser



Diskusi dan Ramah-Tamah di Pendopo Gubernur Aceh



Kunjungan ke Integrated Cold Storage Lampulo



Pertemuan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo



Pertemuan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.antarane.ws.com/berita/3175229/komisi-iv-dpr-ri-minta-klhk-optimalkan-pengamanan-gunung-leuser-aceh>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/529713/dpr-minta-kantor-balai-tngl-lebih-optimal-dalam-laksanakan-konservasi>

<https://www.antarane.ws.com/berita/3175229/komisi-iv-dpr-ri-minta-klhk-optimalkan-pengamanan-gunung-leuser-aceh>

<https://www.readers.id/read/klhk-dinilai-tidak-serius-kelola-tngl-leuser/index.html>

<https://www.readers.id/read/ta-khalid-hutan-aceh-lebih-aman-saat-konflik/index.html>

<https://www.beritamerdekaonline.com/2022/10/pj-bupati-harapkan-komisi-iv-dpr-ri-dukung-program-pemda-bener-meriah/>

<https://dkp.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/kunker-ke-pps-kutaraja-komisi-iv-dpr-ri-sebut-pengerukan-muara-mulai-dikerjakan-tahun-2023>

<https://podcasts.apple.com/us/podcast/kunjungi-pps-lampulo-aceh-kkp-bersama-komisi-iv-dpr/id1520657910?i=1000509419684>

<http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/info-aktual/1504-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-bptp-balitbangtan-aceh>